



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Triwulan I 2026

BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I 2026 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan yang sudah diberikan. Dan kepada para pihak terlibat lainnya dalam penyusunan Laporan, turut kami ucapkan terima kasih .

Pada tahun anggaran 2026, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Tahun 2026 dilengkapi dengan pembahasannya.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2026 mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 13 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2026 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami sadar bahwa laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 April 2026
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Aulia Riza Farhan

ISI

KATA PENGANTAR.....	1
ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan	2
c. Tugas dan Fungsi.....	2
d. Sumber Daya Manusia	3
e. Potensi	3
f. Permasalahan dan Tantangan	4
g. Strategi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal	6
b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2026.....	6
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2026	7
d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	13
IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	17
IK 3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional.....	19
IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	22
IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	23
IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	25
IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan.....	28
IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	31
IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN	34
IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	36
IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	37
IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	38

IK 13 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	40
1. Realisasi Anggaran.....	41
2. Kinerja Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2026	41
a. Efisiensi penggunaan sumber daya di dalam Laporan Kinerja.....	41
b. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Triwulan I 2026 sebagai umpan balik Perencanaan Triwulan Selanjutnya	42
3. Penghargaan.....	44
4. Penyesuaian Anggaran	44
5. Evaluasi pencapaian kinerja	44
6. Perubahan budaya kinerja.....	45
BAB IV PENUTUP	46
Kesimpulan	46
Saran.....	46
LAMPIRAN	47
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2026	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Biro HKLN	3
Gambar 2. Screen capture aplikasi kinerjaku Triwulan I 2026 untuk akun Biro HKLN	11
Gambar 3. Screen <i>capture</i> Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan I 2026	12
Gambar 4. Peluncuran Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act, Januari 2026...	15
Gambar 5. Koordinasi Tumpahan Minyak Montara dengan Ketua Neutral Committee (NC).....	16
Gambar 6. Koordinasi Persiapan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 RI-Rusia, SKB ke-8 RI-Belarus dan Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Industry and Investment (WGII) RI-Rusia, Maret 2026	16
Gambar 7. Pejabat Pimpinan Tinggi KKP bernegosiasi agar tercapai kesuksesan pembangunan ekonomi biru melalui forum kerja sama multilateral PrepCOM-3	21
Gambar 8. Pejabat Pimpinan Tinggi KKP berdiplomasi biru memperjuangkan kepentingan KKP diterima dalam forum kerja sama APEC Ocean Resilience Enhancement Roadmap (ORER).....	21
Gambar 9. KKP News Edisi Februari 2026	24
Gambar 10. KKP News Edisi Maret 2026.....	24
Gambar 11. Penyampaian Arahan dan Sambutan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KKP pada Forum Keterbukaan Informasi Publik (Seminar dan Penganugerahan)	26
Gambar 12. Apresiasi untuk PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Forum Keterbukaan Informasi Publik 2026.....	27
Gambar 13. Pemberian Layanan prima PPID untuk masyarakat Indonesia oleh para profesional penyelenggara PPID dari Biro HKLN	27
Gambar 14. Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Dalam Acara Kunjuran Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke Masyarakat.....	30
Gambar 15. Layanan Hubungan Lembaga Biro HKLN Dalam Acara Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI.....	30
Gambar 16. Pemberian Layanan Prima Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Perpustakaan KKP kepada siswa dan siswi KB Kawan Cendekia	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pegawai Biro HKLN Tahun 2025	3
Tabel 2. Sasaran Program/Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029	6
Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2026	7
Tabel 4. Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025	9
Tabel 5. Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2026.....	10
Tabel 6. Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I 2026	13
Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan 2023 s.d. 2025.....	13
Tabel 8. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2026.....	17
Tabel 9. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023 s.d. 2025	17
Tabel 10. Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional.....	19
Tabel 11. Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan I 2023 s.d. 2025.....	19
Tabel 12. Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	22
Tabel 13. Realisasi dan Capaian IK Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	23
Tabel 14. Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	25
Tabel 15. Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	28
Tabel 16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023 s.d. 2025	28
Tabel 17. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	32
Tabel 18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2023 s.d. 2025	32
Tabel 19. Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	34
Tabel 20. Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN.....	36
Tabel 21. Target dan Realisasi IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan akhir tahun 2019 s.d 2025.....	36
Tabel 22. Realisasi dan Capaian IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN.....	37
Tabel 23. Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Akhir Tahun 2020 s.d 2024.....	37
Tabel 24. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN	38
Tabel 25. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2020 s.d. 2025	38
Tabel 26. Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN	40
Tabel 27. Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Akhir 2020 s.d 2025	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam Peraturan tersebut diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersifat strategis karena secara timbal balik berperan sebagai komunikator atau penjemabatan secara horizontal yaitu antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan counterpart dari negara asing mitra Indonesia dan dengan organisasi kerja sama regional dan internasional. Selain itu Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berperan secara vertikal yaitu mediator arus informasi dari Menteri kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kepada publik umum serta menjadi hub informasi masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri merelasikan kebijakan Menteri dan pimpinan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan publik eksternal di dalam dan di luar negeri (serta kepada publik internal Kementerian) juga memiliki nilai strategis yang tidak kalah penting.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait, pada tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dieksplisitkan ke dalam 13 (empat belas) Indikator Kinerja dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah.

Strategi yang telah dilakukan Biro HKLN memenuhi target semua IK pada periode triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh bimbingan Kepala Biro HKLN
- b. Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Biro Perencanaan yang adalah unit kerja pemerintah pembina pengelolaan kinerja di KKP serta merupakan *think tank* pembangunan sektor perikanan dan sektor kelautan Indonesia
- c. Memastikan para pejabat yang bertanggung jawab langsung pada pelaksanaan IK dan semua bawahannya ingat akan target IK untuk dipenuhi di Triwulan I 2026, dan
- d. Menemukan solusi jika terdapat indikasi atau kemungkinan tidak tercapainya target IK di Triwulan I 2026.

Hasil penghitungan Indikator Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2026 adalah:

1. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target di Triwulan I 2026 sebesar 20%, hasil penghitungannya sebesar 95,24% maka capaiannya menjadi sebesar 476,20% (pernghitungan oleh aplikasi kinerja akan menjadi 120%)
2. Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP, target di Triwulan I 2026 adalah 89%, hasil penghitungannya sebesar 95,56% maka capaiannya menjadi sebesar 107,37%

3. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional. Target Indikator Kinerja di Triwulan I 2026 sebesar 10%. Hasil penghitungan realisasi sebesar 20% maka capaiannya menjadi 200 %(pernghitungan oleh aplikasi kinerjaku akan menjadi 120%)
4. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan. Target Indikator Kinerja sebesar 95%. Hasil penghitungan IK sebesar 98,33% sehingga capaiannya menjadi 103,51%
5. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP, target Indikator Kinerjanya sebesar 91, hasil penghitungan Indikator Kinerja sebesar 97,55 maka capaiannya menjadi 105,20%
6. Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN, hasil penghitungan Indikator Kinerja sebesar 100% maka capaiannya menjadi 116,28%

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang merupakan aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro HKLN pada Triwulan I 2026 adalah 112,48. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Biro HKLN memperoleh predikat istimewa.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2026 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama Triwulan I 2026. Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN juga memuat pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2026 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh tim kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab pada setiap triwulan kepada ketua tim kerja dukungan manajerial Biro HKLN. Selanjutnya kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem elektronik yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sasaran Program Sekretariat Jenderal KKP 2026 adalah:

- Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP
- PNPB BLU sektor KP meningkat

Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KKP 2025 adalah:

1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP
2. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP
5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP
6. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP
7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal
8. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal
9. Persentase Pencapaian Target PNPB Layanan LPMUKP
10. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah:

- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

c. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat Kementerian dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi Biro HKLN:

- a. penyiapan koordinasi, perencanaan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- b. penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan layanan informasi publik;
- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- d. penyiapan koordinasi, pelayanan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- e. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pengelolaan perpustakaan; penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- f. penyiapan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Gambar 1. Struktur Biro HKLN



Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi secara eksklusif tetapi visi, misi, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP. Rumusan visi Sekretariat Jenderal KKP adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional” untuk mewujudkan “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Sedangkan misi Sekretariat Jenderal adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Triwulan I 2026 berjumlah 79 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah pegawai Biro HKLN Tahun 2025

No	Berdasarkan Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1	PNS	42
2	PPPK	18
3	PPPK Paruh Waktu	3
4	PJLP	17
5	Diperbantukan dari Ditjen Budi Daya (PPPK)	1
No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	45
2	Perempuan	36
No	Berdasarkan Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Tim Kerja Kerja Sama Bilateral	9
2	Tim Kerja Kerja Sama Multilateral	10
3	Tim Kerja Pemberitaan dan Opini Publik	33
4	Tim Kerja Layanan Informasi Publik	7
5	Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	7
6	Tim Kerja Dukungan Manajerial	15
Jumlah		81

e. Potensi

Potensi yang dimiliki Biro HKLN dalam melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi Biro HKLN sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait adalah:

- a. Komitmen kuat dari Kepala Biro HKLN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Sumber daya manusia pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berintegritas, handal, tangguh, berinteleksi cukup tinggi dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro HKLN
- c. Lebih dari 80% atau mayoritas sumber daya manusia Biro HKLN menyelesaikan pendidikan jenjang perguruan tinggi. Diantaranya perguruan tinggi nasional bergengsi seperti Sekolah Tinggi Perikanan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara serta beberapa perguruan tinggi di negara maju yang tersebar di Inggris, Jepang, Australia, dan Korea Selatan
- d. Biro HKLN memiliki *network* nasional dan internasional yang luas termasuk dengan organisasi-organisasi multilateral/kerja internasional bergengsi seperti PBB, WTO, IMF, Bank Dunia, ILO, IMO, ASEAN, Uni Eropa, dan CTI-CFF yang bermanfaat dalam mendukung ekspansi pasar dan negosiasi dagang komoditas kelautan dan perikanan Indonesia
- e. Sumber daya manusia Biro HKLN yang bergerak dalam bidang komunikasi publik dan kehumasan adalah asset unggul, berharga dan berpengalaman yang dimiliki KKP dan di tahun 2024 menunjukkan prestasi memenangkan peringkat/score tertinggi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
- f. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai sebagai anugerah kinerja, pelaksanaan komitmen dan kemurahan petinggi KKP dan pimpinan Biro HKLN.

f. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) adalah permasalahan utama dan/atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu Biro HKLN merumuskan bahwa isu strategis atau permasalahan, hambatan dan tantangan juga adalah kondisi yang harus menjadi fokus perhatian dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN.

Adapun isu strategis menantang yang telah diidentifikasi untuk tahun 2026 adalah

- a. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy dimana hal tersebut yang tidaklah selalu mudah di lapangan terutama dikarenakan faktor eksternal (termasuk geopolitik) yang dinamis.
- b. Hubungan masyarakat, menjaga keterbukaan informasi serta membangun komunikasi dua arah antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masyarakat/publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, humas menyampaikan informasi, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menjadi corong yang memastikan kebijakan, program, maupun kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diketahui masyarakat secara jelas, akurat, dan transparan, juga membangun citra positif melalui strategi komunikasi yang efektif dimana humas berperan dalam membentuk persepsi publik agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dipandang kredibel, profesional, dan dekat dengan masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah

dalam menjelaskan tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar supaya lebih mudah diterima sekaligus dipahami oleh masyarakat.

g. Strategi

Strategi yang diambil dan/atau dipilih Biro HKLN menghadapi dan mengatasi permasalahan dan tantangan adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh bimbingan Kepala Biro HKLN;
- b. Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Kepala dan para pejabat dari unit kerja Sekretariat Jenderal pembina manajemen kinerja di KKP sekaligus *think thank* pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- c. Memastikan semua pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan IK beserta bawahannya tidak pernah lalai akan tanggung jawab pemenuhan target IK Biro HKLN diantaranya melalui komunikasi informal; dan
- d. Menemukan solusi jitu jika ada kemungkinan tidak tercapainya pemenuhan target IK pada setiap periode (triwulanan, semesteran dan tahunan) dan menyelesaikannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, Sekretariat Jenderal KKP berperan mengawal Sasaran Strategis “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP” yang diwujudkan melalui penguatan fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi di seluruh unit organisasi KKP. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja dan besar targetnya yang menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Sasaran Program/Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	1	Nilai RB general KKP (Nilai)	84,8	84,85	84,9	84,95	85
		2	IP ASN lingkup KKP (Indeks)	82	82,5	83	83,5	84
		3	Nilai keterbukaan informasi publik KKP (Nilai)	97	97,25	97,5	97,75	98
		4	NKPA KKP (nilai)	82,5	82,75	83	83,25	83,5
		5	Nilai Hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (Nilai)	77	78	79	80	81
		6	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setjen KKP (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%)	85	86	87	88	89
		8	Nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (Nilai)	76	77	78	79	80
2	PNBP BLU Sektor KP meningkat	9	Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	97	97,2	97,5	97,8	98
		10	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	90	91	92	93	94

Indikator kinerja program Setjen yang menjadi tanggungjawab Biro HKLN adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP.

b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2026

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Oleh karena itu, sampai Triwulan I 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Biro HKLN melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja yaitu pada 26 Januari 2026. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Biro HKLN pada tahun anggaran 2026 mengelola anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Substansi Perjanjian Kinerja yaitu Sasaran Kegiatan dan butir-butir Indikator Kinerja dan targetnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2026	Target Triwulan I 2026
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	100
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	89	92,94
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	94	100
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	.
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97,5	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	97,25	-
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	99,51
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	91	95,37
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87,2	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82,5	-
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	86	100
		13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	-

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2026

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diperoleh Biro HKLN sebagai hasil pelaksanaan seluruh Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN pada akhir tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, rumusan sasaran Biro HKLN pada tahun 2026 adalah:

- Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri
- Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik
- Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN

Dalam rangka mewujudkan dan memungkinkan terukurnya sasaran-sasaran di atas maka seluruh dibentuklah Indikator Kinerja yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif supaya memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja. Butir-butir Indikator Kinerja juga merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari informasi kinerja Biro HKLN Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN;
- Membantu pihak yang ingin merumuskan penganggaran yang berbasis pada kinerja;
- Memudahkan Biro HKLN untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung;
- Mengubah paradigma kerja menjadi kinerja;

- Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Biro HKLN untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia;

Manfaat lainnya dari informasi kinerja adalah terbentuknya paradigma bahwa program dan kegiatan memiliki output dan outcome yang jelas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih jelas keefektifan dan keefisiensiannya. Implikasinya adalah seluruh jajaran Biro HKLN terpacu untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Selain itu, Biro HKLN turut semakin mampu memberikan pelayanan kepada publik internal KKP dengan baik

d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Keselaran dalam perencanaan indikator kinerja pada hakikatnya turut menjadi prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang diusung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Detil indikator kinerja Biro HKLN tahun 2026 dan target indikator kinerja Tahun 2026 yang disandingkan dengan tahun terakhir pada Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Renstra Setjen 2025-2029
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	97
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	89	92
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	94	96
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97,5	99
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	97,25	98
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	97
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	91	94
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87,2	87,8
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82,5	84
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	100
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	86	89
		13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	-	100
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Ketua Tim Dukungan Manajerial Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan KKP. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode Triwulan I 2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per April 2026.

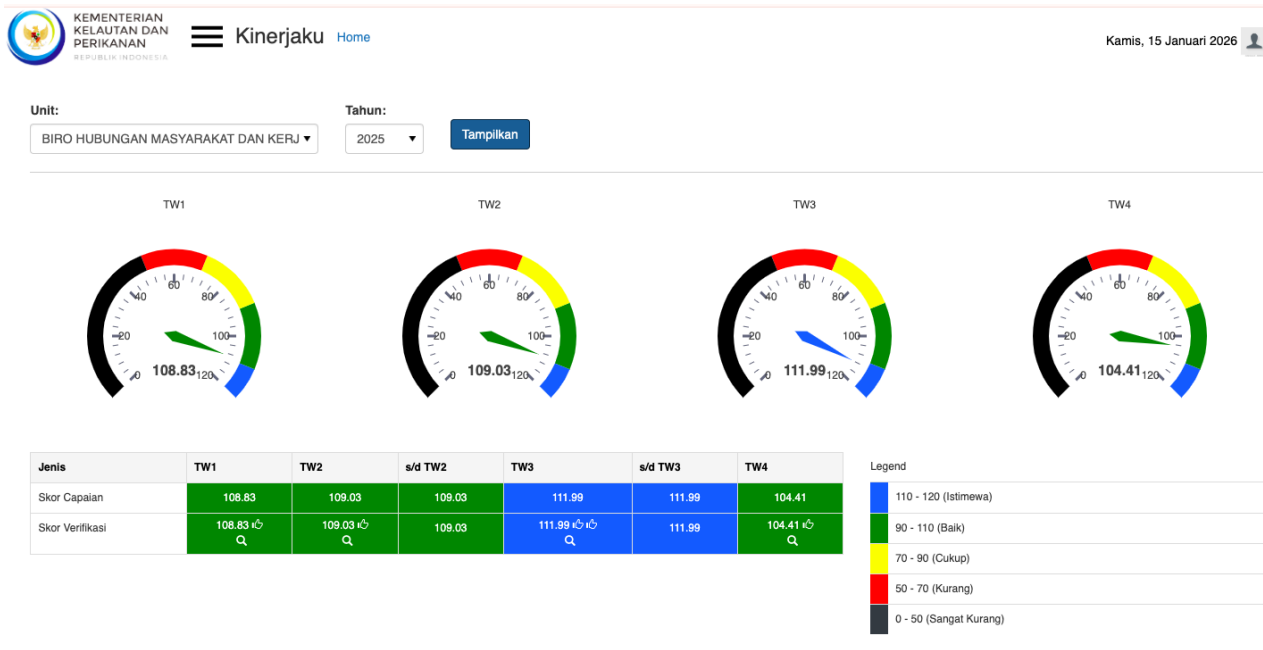
Tabel 5. Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Persentase Capaian
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	100%	105,28%
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	92,94%	105,61%
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	100%	107,53%
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	.	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	-	-	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	-	-	-
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	99,51%	10475%
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	95,37	105,97%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	-	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	-	-	-
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	-	-	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	86	100%	117,65%
		13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	-	-	-

Gambar 2. Screen capture aplikasi kinerjajaku Triwulan I 2026 untuk akun Biro HKLN

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  e-Kinerja Home Kamis, 15 Januari 2026 									
NKO Desember - 2025 Download									
Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI Skor Kinerja : 104.41									
- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓ - Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol  - Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+									
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri						104,80		
IKSK.1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang diindikasikan/juti Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	100,00	105,26	02-Jan-2026 14:37
IKSK.2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	92,94	105,61	02-Jan-2026 14:37
IKSK.3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Akumulasi	93,00	93,00	100,00	107,53	02-Jan-2026 14:37
IKSK.4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%) Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik						104,28		
IKSK.02.1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	97,00	100,00	103,09	02-Jan-2026 14:37
IKSK.02.2	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,00	96,00	100,00	104,17	02-Jan-2026 14:37
IKSK.02.3	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	99,51	104,75	02-Jan-2026 14:37
IKSK.02.4	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	95,37	105,97	02-Jan-2026 14:37
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN						104,35		
IKSK.03.1	Nilai PM SAKIP Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	87,00	87,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.2	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	85,64	104,44	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.3	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.5	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.6	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	98,72	103,92	02-Jan-2026 14:37
Tutup									

Gambar 3. Screen capture Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerja Triwulan I 2026



Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I 2026;
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun Triwulan I 2026 dengan Triwulan I 2025;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir Triwulan I 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025-2029;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) atau menunjukkan peringkat KKP berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Kementerian/Lembaga secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama Triwulan I 2026;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja/KL maupun instansi dan lembaga terkait.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian.
8. Indikator Kinerja yang bersifat tahunan dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini dengan menyampaikan progres telah dilakukan hingga akhir tahun.

IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti adalah tindak lanjut atas kerja sama bilateral aktif atau Langkah selanjutnya atas perjanjian aktif antara Indonesia dengan negara sahabat/dengan organisasi internasional dalam bidang kelautan dan perikanan, misalnya dalam bentuk pertemuan, kegiatan bersama dan korespondensi. Perjanjian aktif internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sedangkan tindak lanjut atau implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional

Tabel 6. Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I 2026

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025- 2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
20%	476,20%	120%	20%	65%	120%	97%	nihil	490,93%

Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan 2023 s.d. 2025

2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R
90%	100%	95%	100%	20%	65%

IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru dikenalkan Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama' dengan target di tahun 2026 sebesar 95%.

Pada tahun 2026, terdapat 21 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 21 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation
2. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain
3. Maritime and Fisheries Surveillance System Project Spain - KKP
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme
5. Plan of Action Strategic Partnership RI - Perancis
6. Technical Cooperation Agreement Proyek Kerja Sama ALDFG KKP – AFD
7. Eco Fishing Port Project ;
8. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022
9. Joint Declaration Indonesia - Norwegia

10. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD
11. Solar Cold Chains for Green Economy in Indonesia
12. Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of England concerning Cooperatives Activities in Maritime Affairs ;
13. Blue Planet Fund
14. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA
15. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia
16. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission
17. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation;
18. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation
19. MoU in the Fields of Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Arab Saudi
20. Agreement Between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Australia
21. Protocol to Amend the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Marine and Fisheries Cooperation

Hingga akhir Triwulan I 2026, dari 21 dokumen kerja sama bilateral, terdapat 7 kerja sama aktif yang telah ditindak lanjut. Jumlah dokumen tindak lanjut kerja sama aktif tersebut sebanyak 20, oleh karena itu, realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' pada Triwulan I 2026 adalah

$$(20/21) \times 100\% = 95,24\%$$

Target indikator kinerja ini pada Triwulan I 2026 adalah 20% maka capaiannya menjadi:

$$(95,24\%/20\%) \times 100\% = 476,20\%$$

Oleh karena 476% lebih besar dari 120% maka aplikasi kinerja menetapkan capaian untuk IK ini pada Triwulan I 2026 sebesar 120%.

Dibandingkan dengan realisasi dan target di Triwulan I 2025 maka terjadi peningkatan baik realisasi dan capaian. Realisasi IK juga sudah melampaui target Renstra Setjen. IK ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan. Pencapaian target IK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN yang andal dan berpengalaman, oleh karena itu tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Tim Kerja Sama Bilateral memenuhi target IK ini adalah:

- Kegiatan tindak lanjut kerja sama bilateral aktif dilaksanakan sesuai atau lebih awal daripada jadwal indikatif penyelenggaraan melalui pertemuan yang dilakukan baik secara virtual dan melalui tatap muka;
- Hubungan internasional dalam konteks kerja bilateral sektor kelautan dan perikanan selama Triwulan I 2026 dapat diimplementasikan dengan baik juga karena faktor keikutsertaan KKP

dalam fora kerja sama bilateral melalui Biro HKLN dalam rangka implementasi diplomasi biru di bidang kelautan dan perikanan dan peran serta posisi Biro HKLN sebagai unit kerja KKP pembina hubungan internasional di lingkup KKP dipandang penting dan sangat diperhitungkan karena biasa berfungsi sebagai diplomat KKP

- Posisi dan keberadaan KKP yang mewakili Republik Indonesia dalam percaturan internasional sektor kelautan dan perikanan di forum bilateral selalu dipandang strategis dan sangat diperhitungkan. Hal ini tercermin dari partisipasi delegasi RI dalam kegiatan kerja sama luar negeri seperti pertemuan bidang kelautan dan perikanan atau pendampingan dan supervisi Biro HKLN dalam kegiatan kerangka kerja sama Amerika Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika Timur Tengah. Sumbangsih pemikiran dari para pejabat dan pegawai Biro HKLN di forum bilateral yang dihadiri KKP kerap diakui kreatif, inovatif, *out of the box* dan menawarkan solusi. Hal ini setidaknya nampak dari penyambutan, penanggapan dan penerimaan yang positif dari negara mitra, dan oleh organisasi-organisasi kerja sama regional dan multilateral, serta juga dibuktikan melalui apresiasi terhadap substansi dokumen kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia yang diajukan dan dipantau oleh delegasi Biro HKLN.

Tidak ada kendala serius yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi target IKK selama Triwulan I 2026. Rencana aksi untuk tahun 2026 adalah kegiatan-kegiatan yang meneruskan penindaklanjutan dokumen kerja sama bilateral yang aktif. Penindaklanjutan tersebut didasarkan arahan dan bimbingan dari pimpinan Biro HKLN. Tidak ada laporan resmi bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Biro HKLN baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya adalah melakukan aktivitas yang menindaklanjuti perjanjian-perjanjian kerja sama aktif yang belum dilaksanakan pada triwulan I 2026.

Gambar 4. Peluncuran Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act, Januari 2026



Gambar 5. Koordinasi Tumpahan Minyak Montara dengan Ketua Neutral Committee (NC)



Gambar 6. Koordinasi Persiapan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 RI-Rusia, SKB ke-8 RI-Belarus dan Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Industry and Investment (WGII) RI-Rusia, Maret 2026



IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh Biro HKLN diperoleh dari survei kepuasan pelayanan kepada pengguna yang telah menerima layanan pengurusan administrasi izin PDLN yang mencakup pengajuan izin PDLN ke Kementerian Sekretariat Negara, pengajuan pembuatan paspor dinas dan rekomendasi visa (bagi PDLN yang memerlukan visa) ke Kementerian Luar Negeri. Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Responden pengisi kuesioner khususnya adalah narahubung PDLN dan/atau pelaku PDLN (jika memungkinkan) di unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 8. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2026

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
89%	95,56%	107,37%	88%	83,31%	94,67%	92%	nihil	103,87%

Tabel 9. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023 s.d. 2025

2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R
85%	87,45%	88%	88,89%	88%	83,31%

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pada tahun Triwulan I 2026 telah ada realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yaitu masing-masing sebesar 95,56% dan 107,37%. Jika dibandingkan dengan hasil realisasi dan capaian IK yang sama dengan tahun 2025 maka pada tahun 2026 mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir pada jangka menengah dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, maka capaian IK ini sebesar 103,87%

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2026. Untuk mengetahui kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online pada Triwulan I 2026 memakai aplikasi google forms survey. Terdapat 10 orang responden yang mengisi dan menyerahkan kuisisioner.

Pertanyaan disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat anda tentang kualitas pelayanan di tengah dinamika kebijakan/perubahan penganggaran seperti efisiensi anggaran belanja?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?

7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana?
9. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Apabila mengacu kepada matriks di bawah ini yang dimodifikasi lampiran dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka, dengan realisasi sebesar 95,56%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP tahun 2025 adalah sangat baik atau berkinerja sangat baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	100-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-83,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dibandingkan dengan target tahun akhir Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 maka persentase capaian IKK ini sebesar 103,87%. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Realisasi IK ini melanjutkan tradisi sukses Biro HKLN memenuhi target pada IK yang sama. Biro HKLN telah mengusahakan peningkatan kecepatan layanan pada fase fasilitasi pdln ditangani oleh KKP sampai dengan penyampaian ke Sekretariat Negara melalui aplikasi. Upaya persuasif melalui jalur informal untuk bermohon perkenan para responden memberi apresiasi setinggi mungkin kepada layanan PDLN yang disajikan Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2026 juga tetap dilanjutkan. Hasilnya baik yaitu Biro HKLN tetap mampu memenuhi target IK pada akhir Triwulan I 2026. Aspek yang dapat diberikan perhatian pada triwulan berikutnya adalah nomor 3 yaitu terkait dengan kecepatan waktu dalam pemberian layanan karena mendapat nilai paling rendah dibanding aspek lainnya berdasarkan hasil kuisioner yang dikumpulkan.

Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi petugas administrasi PDLN pada Triwulan I 2026 adalah:

1. Pemberian layanan sebaik mungkin dan secepat mungkin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara
2. Pemberian layanan pengurusan paspor dinas, dan
3. Pemberian layanan pengurusan visa

Tidak ada laporan resmi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) Biro HKLN dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan layanan PDLN sepanjang Triwulan I 2026. Akhirnya, perlu diingat bahwa kepiawaian jajaran pimpinan Biro HKLN dalam memotivasi/mendorong para pegawai Biro HKLN untuk bekerja dengan cermat, cerdas dan prima serta penuh dedikasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara Indonesia berkontribusi nyata terhadap keberhasilan Biro HKLN memenuhi target IK.

IK 3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Sebelum menghadiri pertemuan internasional, Delegasi RI perlu untuk menyusun dokumen Pedoman Delegasi RI (Delri) agar tercipta keseragaman atas posisi Delri dan memudahkan koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri yang didelegasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pedoman Delri tersebut memuat posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia terhadap isu yang dibahas di forum internasional dan Delri memperjuangkan posisi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam laporan forum internasional tersebut.

Pengaruh dan peran Indonesia dalam suatu forum internasional dapat dilihat dari persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima dalam forum internasional tersebut. Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Delri dapat menyuarakan kepentingan nasional di level internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dijabarkan salah satunya dalam bentuk program prioritas Kementerian.

- Posisi adalah kedudukan/pandangan/kepentingan RI dalam pembahasan suatu agenda/isu di forum internasional.
- Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam forum internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.
- Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral.
- Diterima adalah dicatatnya/dicantumkan/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan internasional.

Laporan dan dokumen sidang dapat berbentuk Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, laporan Delri, agreements, MOU's, summary record/ of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, atau work plan/program.

Tabel 10. Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025- 2029	Standar Nasiona I	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
10%	20%	120%	10%	9,5%	95%	96%	nihil	20,83%

Tabel 11. Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan I 2023 s.d. 2025

2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R
25%	21,21%	15%	22,86%	10%	9,5%

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam dua tabel di atas, pada tahun Triwulan I 2026 Biro HKLN berhasil memenuhi target IK karena realisasi IK sebesar 20% sehingga capaiannya menjadi 120%

berdasarkan aplikasi kinerjaku sedangkan target IK adalah 10%. Sedangkan dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, capaian IK ini adalah 20,83%. Dibandingkan dengan realisasi dan capaian di Triwulan I 2025 maka jelas mengalami kenaikan karena Tim Kerja Sama Multilateral lebih berpengalaman dalam mengerjakan tugas dan fungsi. Tidak tersedia standar nasional untuk IK ini yang dapat dipakai atau diacu sebagai pembandingan. Selain itu dibanding dengan realisasi dan capaian di triwulan yang sama tahun 2025, maka terjadi perolehan yang sama baik pada realisasi maupun capaian.

IK Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Pada tahun 2026, direncanakan terdapat 15 (lima. belas) target yaitu diterimanya posisi Indonesia pada forum-forum kerja sama multilateral sebagai berikut:

- 1) Sidang FAO Sub-Committee on Fisheries Management
- 2) Sidang COFI ke 37
- 3) Sidang COP UNFCCC
- 4) Annual Meeting ATSEA
- 5) BBNJ PrepCom-3/COP
- 6) OFWG: APEC Ocean Resilience Roadmap
- 7) Update Komitmen Lama & Usulan Komitmen Baru OOC
- 8) ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi)
- 9) ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)
- 10) SEAFDEC Council Meeting
- 11) SEAFDEC Program Committee Meeting
- 12) Fisheries Consultative Forum: ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership
- 13) Pertemuan IORA WGBE
- 14) CTI-CFF: WG, SOM. MM
- 15) CTI-CFF: IRC

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari Tim Kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir Triwulan I 2026, terdapat 3 forum kerja sama multilateral yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN /KKP dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan sehingga dihasilkan 3 dokumen berisi posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Adapun ketiga forum tersebut adalah

- 1) Sidang FAO Sub-Committee on Fisheries Management
- 2) BBNJ PrepCom-3/COP
- 3) OFWG: APEC Ocean Resilience Roadmap

Penyebab keberhasilan Biro HKLN dalam memenuhi target IK diantaranya adalah forum kerja sama multilateral yang menghadirkan Biro HKLN untuk terlibat dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau dapat dilaksanakan masih pada periode Triwulan I 2026. Pelaksanaan kegiatan terkait IK didanai anggaran Biro HKLN dan didukung sumber daya manusia Biro HKLN yang cukup dikenal luas profesionalitas dan integritasnya sehingga tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Rencana di triwulan berikutnya tahun 2026 adalah melanjutkan menghadiri pertemuan multilateral yang dijadwalkan sepanjang tahun 2026 dan diharapkan semua organisasi kerja sama multilateral mitra Biro HKLN/KKP tidak ada yang mengganti jadwal kegiatan dari yang direncanakan.

Gambar 7. Pejabat Pimpinan Tinggi KKP bernegosiasi agar tercapai kesuksesan pembangunan ekonomi biru melalui forum kerja sama multilateral PrepCOM-3



Gambar 8. Pejabat Pimpinan Tinggi KKP berdiplomasi biru memperjuangkan kepentingan KKP diterima dalam forum kerja sama APEC Ocean Resilience Enhancement Roadmap (ORER)



IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Kepemimpinan pada Forum Regional/Multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, atau sebagai anggota Organisasi Internasional (OI) dengan menduduki suatu jabatan strategis pada OI tersebut.

Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kegiatan dan melaksanakan program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi Focal Point OI tersebut, dalam hal ini adalah KKP. Forum Regional/Multilateral adalah organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral. OI adalah institusi yang beranggotakan 3 negara berdaulat atau lebih.

Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa Komite dan Working Group, antara lain dapat menjadi Presidensi dan Ketua Organ Subsider. Indonesia juga dapat ditunjuk sebagai Host atau Co-Host, sebagai member of Bureau, Member of Council, Member of Board, Coordinator of (Group). Keberhasilan pencalonan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan

Tabel 12. Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025- 2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Pada tahun 2026, forum regional dan multilateral yang menjadi dasar pemenuhan target Indikator Kinerja ini berjumlah 4 (empat) yaitu:

1. Annual RCC Meeting ATSEA (direncanakan pada Triwulan 4 2026)
2. Ocean Impact Summit (direncanakan pada Triwulan 4 2026)
3. SOM dan MM CTI-CFF (direncanakan pada Triwulan 4 2026)
4. The 8th Global Fisheries Enforcement Workshop (GFEW) IMCS Network (direncanakan pada Triwulan 3 2026)

IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Sumber informasi hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Republik Indonesia. Besar indeks dihitung dari rerata nilai dimensi input dan dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang akan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2026 dan diumumkan biasanya pada akhir tahun anggaran atau di awal tahun anggaran berikutnya.

Tabel 13. Realisasi dan Capaian IK Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	99	nihil	Belum

Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah IKK yang frekuensi penghitungannya bersifat tahunan. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2026, dalam rangka mensukseskan Biro HKLN dalam memenuhi target IK ini maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

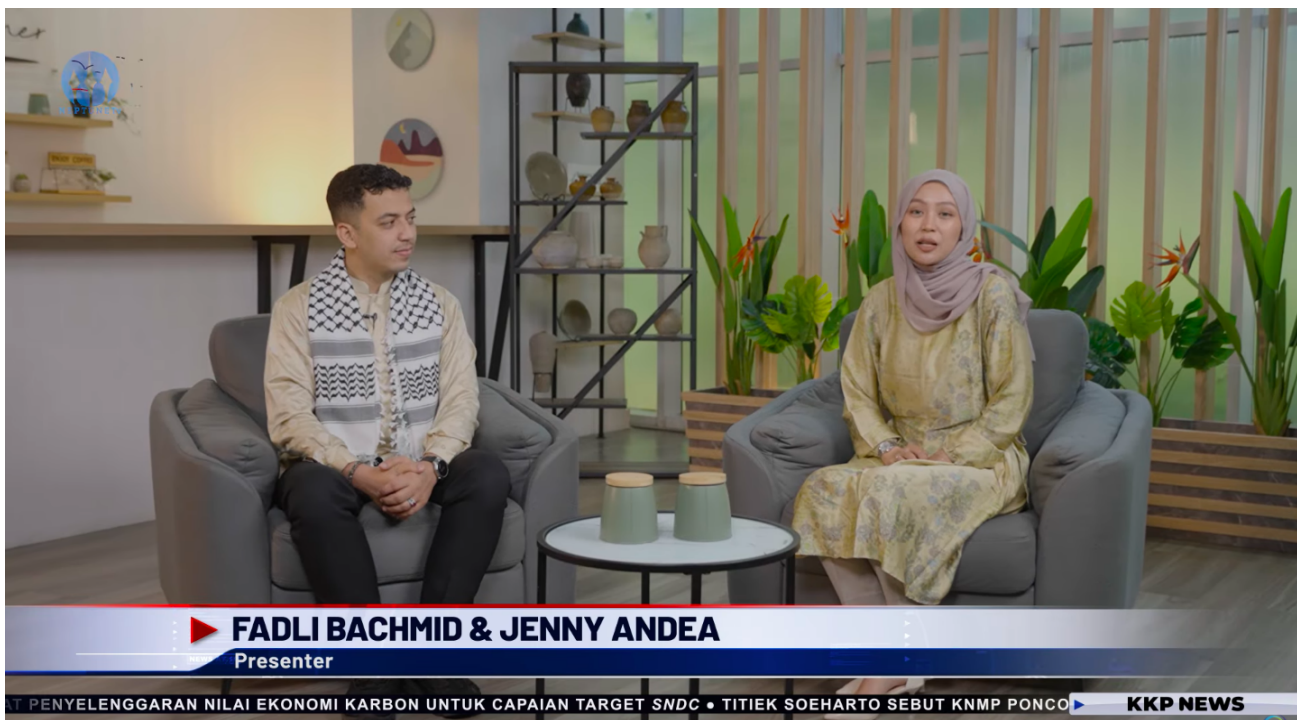
- Monitoring media sosial terhadap
 - Sejumlah konten di instagram,
 - Sejumlah konten di facebook,
 - Sejumlah konten di tiktok, dan
 - Sejumlah video, short, dan live konten di youtube;
- Monitoring media massa dengan terhadap pemberitaan di media massa
- Pelaksanaan konferensi pers;
- Pelaksanaan Bincang Bahari;
- Pelaksanaan Morning Sea;
- Pembuatan siaran pers;
- Produksi episode podcast;
- Produksi episode KKP News Monthly;
- Penyusunan strategi komunikasi
 - a. Strategi Komunikasi Swasembada Garam
 - b. Optimalisasi Peran Penyuluh Kelautan & Perikanan Sebagai Penyampai Informasi Program & Kebijakan KKP.
 - c. Strategi Publikasi Dapur Emas Nusantara
 - d. Strategi Kampanye Media Hari Segitiga Terumbu Karang
 - e. Strategi Publikasi Launching Stelina

Selama pelaksanaan kegiatan di atas, tidak ada kendala serius di internal Biro HKLN seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan pendanaan. Rencana kegiatan di triwulan berikutnya adalah aktivitas reguler terkait dengan pengelolaan layanan produksi dan publikasi produksi video dokumenter. Tugas utama terpenting yang kelak dituntaskan Tim Kerja Pemberitaan dan Opini Publik (POP) target IK ini adalah mengisi Survei Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2026 dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebaik-baiknya. Tujuannya kuisioner tersebut adalah mengukur kinerja pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di tingkat Kementerian seperti KKP dan Lembaga non Kementerian lainnya di tingkat Pusat.

Gambar 9. KKP News Edisi Februari 2026



Gambar 10. KKP News Edisi Maret 2026



IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik adalah IK baru Biro HKLN yang mulai menjadi tanggung jawab Biro HKLN untuk realisasi dan pencapaiannya pada tahun 2025. Pada hakikatnya, Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Biro HKLN analog dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik terutama karena sama-sama mengacu dan berlandaskan kepada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dimana tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada internal KKP terdiri dari:

- a. perencanaan dan
- b. pelaksanaan

Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik dan Indikator penilaian. Tahapan evaluasi mandiri Keterbukaan Informasi pada KKP terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengumuman. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek dinilai, terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Tabel 14. Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	98	nihil	Belum

Sebagaimana ditampilkan dalam kedua tabel di atas terlihat bahwa IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2025 maka pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia informasi realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK yang sama. Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP adalah hasil evaluasi internal yang mengukur sejauh mana KKP sebagai badan publik mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Evaluasi ini dilakukan melalui pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian diverifikasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Hasil verifikasi tersebut biasanya dapat dilihat melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. Berdasarkan aplikasi tersebut, realisasi IK Nilai

Hasil di bawah ini merupakan kegiatan sebagai progress pemenuhan target kinerja dalam rangka pelaksanaan IK ini sampai akhir Triwulan I 2026:

1. Pengelolaan konten website KKP dan Website PPID (pemutakhiran informasi publik dan publikasi konten) telah dilaksanakan pada Januari sampai Maret 2026.
2. Pengelolaan PPID dan call center sebagai kanal layanan informasi telah dilaksanakan dari Januari sampai Maret 2026.
3. Monitoring informasi berkala di website KKP dan PPID KKP telah dilaksanakan pada Maret 2026,
4. Kegiatan forum Keterbukaan Informasi Publik (Seminar dan Penganugerahan) telah dilaksanakan pada Februari 2026.
5. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan PPID Pelaksana lingkup KKP dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan pada Januari sampai Maret 2026

Jumlah permohonan informasi (Januari s.d Maret 2026) sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan informasi (per Maret 2026) sebagai berikut:
 - Permohonan langsung ke ruang PPID KKP : 62
 - Permohonan melalui aplikasi e-PPID : 523
 - Permohonan melalui kanal lainnya (email dan medsos): 913
2. Jumlah pengajuan keberatan (total – per Maret 2026): .0 permohonan
3. Pengaduan layanan BHKLN (SP4N Lapor – per Maret 2026): .0 Pengaduan

Pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Besar target IK ini berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah 98. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

Gambar 11. Penyampaian Arahan dan Sambutan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KKP pada Forum Keterbukaan Informasi Publik (Seminar dan Penganugerahan)



Gambar 12. Apresiasi untuk PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Forum Keterbukaan Informasi Publik 2026



Gambar 13. Pemberian Layanan prima PPID untuk masyarakat Indonesia oleh para professional penyelenggara PPID dari Biro HKLN



IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan III 2023. Pengukuran persentase efektifitas layanan dilakukan dengan penyebaran survei kepada stakeholder (seperti sekretariat Komisi IV DPR, pihak internal KKP, coordinator unjuk rasa dan lain sebagainya) yang telah menerima layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisisioner oleh stakeholder di akhir Triwulan I 2026. Pengukuran dilakukan setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) terhadap layanan-layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) seperti kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan dan atau melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 15. Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025- 2029	Standar Nasiona I	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	98,33%	103,51%	95%	100%	105,26%	97%	nihil	101,37%

Tabel 16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023 s.d. 2025

2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R
80%	92,26%	89%	96,06%	95%	100%

Data pada kedua tabel di atas menunjukkan bahwa pada akhir Triwulan I 2026, realisasi untuk IK ini adalah 98,33% dan oleh karena target IK adalah 95% maka capaiannya menjadi 103,51% atau melampaui 100%. Sedangkan pada Triwulan I 2025 realisasi Indikator Kinerja adalah 100% sehingga mengalami perubahan baik dari segi realisasi dan segi capaian. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir dalam rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu 97% maka capaian dari IK ini adalah 101,37% Sejauh ini, belum pernah ditemukan bahwa ada acuan atau standar yang bisa menjadi pembanding tingkat nasional apalagi internasional untuk IK ini. Catatan dari hasil survey untuk IK ini adalah agar di triwulan berikutnya lebih menguatkan koordinasi dengan pihak eksternal/stakeholder pengguna jasa/layanan dari Biro HKLN melalui Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan.

Manual Indikator Kinerja untuk IKK ini menjadi acuan mengenai efektifitas atau kinerja layanan hubungan lembaga dari Biro HKLN yaitu dalam matriks di bawah ini.

%Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00-64,99	Tidak Efektif
65,00-76,60	Kurang Efektif
76,61-88,30	Efektif
88,31-100,00	Sangat Efektif

Berdasarkan matriks di atas, kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang 88,31% sampai dengan 100%. Diperkirakan, kinerja layanan sangat efektif adalah Biro HKLN sangat memuaskan para pengguna jasa layanan yaitu mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan misalnya seperti memberikan respon yang cepat dan tepat jika ditanya, memberikan informasi rencana layanan yang cukup dengan tidak terlambat, dan lain sebagainya.

Penyebab kerbehasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IK ini yang dapat diidentifikasi adalah:

- Pengalaman tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan selama bertahun-tahun memberikan layanan prima hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP di bidang kelautan dan perikanan membuat tim kerja Komunikasi Kelembagaan sigap dan tangkas untuk mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan hubungan kelembagaan
- Dukungan anggaran dapat dikatakan memadai untuk tim Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan untuk menyediakan layanan prima dalam bidang hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP/Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan
- Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam bekerja efektif dan efisien dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP di bidang kelautan dan perikanan, dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran Biro HKLN yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif

Layanan hubungan lembaga yang diberikan kepada stakeholder pada akhir 2025 adalah pada kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI
2. Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI
3. Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan

Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN mengawal pejabat pimpinan tinggi KKP yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di atas selama Triwulan I 2026. Dalam rangka mengetahui efektifitas layanan oleh Biro HKLN maka dilakukan pembagian kuisioner online kepada stakeholder Biro HKLN yang merupakan rekan-rekan pegawai Biro HKLN bertugas dan berkoordinasi dengan Biro HKLN sejak masa pra-pelaksanaan sampai usai pelaksanaan di masing-masing lokasi untuk membantu dan mengusahakan fasilitasi kegiatan sebaik mungkin.

Hingga akhir Triwulan I 2026, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dalam rangka pemenuhan target IK adalah tetap memberikan layanan prima hubungan kelembagaan sesuai dengan arahan, bimbingan dan penugasan dari Kepala Biro HKLN.

Gambar 14. Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Dalam Acara Kunjuran Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke Masyarakat



Gambar 15. Layanan Hubungan Lembaga Biro HKLN Dalam Acara Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI



IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan diperoleh melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan setiap triwulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan III tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada matriks di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	100-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-83,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang Triwulan I 2026, terdapat 17 orang responden yang menerima layanan perpustakaan dengan jenis sebagai berikut:

- Layanan keanggotaan
- Layanan pemanfaatan ruangan perpustakaan/baca di tempat
- Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi)
- Layanan penelusuran informasi
- Layanan Bimbingan Pemustaka (Pendidikan Pemustaka, Bimbingan Literasi, Orientasi Perpustakaan), dan
- Layanan anak

Tabel 17. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
91	97,55	107,20%	90	95,37	105,97%	94	Nihil	103,77%

Tabel 18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2023 s.d. 2025

2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R
80	88,48	88	90,93	90	95,37

Sebagaimana ditampilkan dalam 2 tabel di atas, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan I 2026 adalah 97,55. Dengan target pada Triwulan I 2026 sebesar 91 maka capaian IK ini adalah 107,20%. Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena realisasi sebesar 97,55 masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100. Dibandingkan dengan target terakhir rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu sebesar 94 maka capaian IK adalah 103,77%. Dibandingkan dengan realisasi dan capaian untuk IK yang sama pada Triwulan I 2025 maka terjadi peningkatan.

Faktor pendukung keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IK adalah arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN tidak pernah diabaikan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mewujudkan karya, karsa dan kerja dalam rangka memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para *customer* perpustakaan KKP. Hingga akhir Triwulan I 2026, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan di tahun anggaran berikutnya dalam rangka pemenuhan target IK ini adalah melanjutkan pemberian layanan reguler perpustakaan KKP dengan memberi perhatian yang lebih lagi kepada aspek standar pelayanan.

Hal yang perlu untuk diperhatikan di waktu selanjutnya dari hasil survey kepuasan adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Tentu saja penanganan hal ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran dan perencanaan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan KKP.

Beberapa kegiatan Perpustakaan KKP di Triwulan I 2026 yang turut menunjang keberhasilan kinerja Biro HKLN memenuhi target IK adalah:

1. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada KB Kawan Cendekia
2. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Highfield Secondary School Bekasi
3. Kunjungan Audiensi Penjajakan Kerjasama bidang perpustakaan dari PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
4. Kunjungan benchmarking dari Perpustakaan BPK
5. Rapat Pembahasan Draft PKS antara BHKLN dengan Sekolah Vokasi UNS
6. Rapat Pembahasan Draft PKS antara BHKLN dengan Sekolah Vokasi UNP
7. Archipelago Bookclub Vol 03

Gambar 16. Pemberian Layanan Prima Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Perpustakaan KKP kepada siswa dan siswi KB Kawan Cendekia



IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 19. Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	87,8	nihil	Belum

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja ini belum telah tersedia di Triwulan I 2026. Besar target IK ini di akhir tahun 2026 adalah 87,2 Penilaian Mandiri SAKIP Biro HKLN akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan berpedoman kepada Permen PAN RB 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi diantaranya mencakup:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini sepanjang Triwulan I 2026. Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh pihak terkait adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil).

Di tahun 2025, rekomendasi SAKIP untuk Biro HKLN tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN Nomor : B.936/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 16 September 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro HKLN tahun 2025 dan tindak lanjut atas rekomendasi terangkum dalam matriks di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024.	Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN naik dari tahun 2024 sebesar 103,59 menjadi 104,41 di tahun 2025.	Sudah ditindak lanjut	https://bit.ly/4r1f54g dan https://bit.ly/4b2Ai9j
2.	Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur	Pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi dilakukan setiap triwulan dan terukur sepanjang 2025.	Sudah ditindak lanjut	https://bit.ly/4sIEIIV dan https://bit.ly/4b2Ai9j
3.	Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja	Sejak Maret 2025 Biro HKLN mengembangkan inovasi sosiokultural dengan melakukan acara doa bersama Biro HKLN sepekan sekali dalam rangka menyegarkan kerohanian karena diyakini berimplikasi positif terhadap upaya peningkatan kinerja individu dan organisasi.	Sudah ditindak lanjut	https://bit.ly/45QCGMR dan https://bit.ly/4b2Ai9j

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka persiapan PM SAKIP selama Triwulan I 2026 adalah mempelajari aspek-aspek penilaian pada LKE (Lembar Kerja Evaluasi) di tahun 2025.

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 20. Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	84	nihil	Belum

Tabel 21. Target dan Realisasi IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan akhir tahun 2019 s.d 2025

2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
71	69,74	72	54,95	73	77,53	78	79,29	79	84,45	85	85,58	82	85,64

Sesuai dengan informasi tersaji dalam kedua tabel di atas, IK ini tidak memiliki angka realisasi untuk Triwulan I 2026. Hal serupa berlaku pada Triwulan I 2025 karena pengukuran IK ini bersifat semesteran. Tidak ada penetapan target tertentu untuk IK ini pada triwulan I sehingga otomatis belum ada persen capaiannya. Sedangkan target akhir tahun renstra untuk IK ini adalah 84 dan tidak ada standar nasional yang bisa dirujuk Biro HKLN sebagai pembanding dalam kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Tidak diperoleh informasi resmi adanya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan pencapaian target IK ini sepanjang Triwulan I 2026.

Kegiatan yang sudah dilakukan di Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2026 dalam rangka pencapaian target IK adalah berbagi informasi rencana kegiatan seminar (cuma-cuma) melalui komunikasi digital di internal Biro HKLN dan aplikasi whatsapp agar sebanyak mungkin pegawai Biro HKLN mengikutinya. Kegiatan yang direncanakan diselenggarakan di Triwulan II 2026 adalah:

- berbagi informasi rencana kegiatan seminar (berbiaya gratis) melalui komunikasi digital
- penyampaian imbauan agar pegawai Biro HKLN mengunggah sertifikat yang diperoleh dari seminar ke aplikasi ekinerja.bkn.go.id

IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK dan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Masih berdasarkan Peraturan yang sama, pejabat yang merupakan satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dimana tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang diwajibkan oleh *competent authority*.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Frekuensi perhitungan pada IKU ini dilakukan secara tahunan dengan capaian yang akan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Keuangan atau Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 22. Realisasi dan Capaian IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 23. Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Akhir Tahun 2020 s.d 2024

2020		2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum dalam kedua Tabel di atas, untuk Triwulan I 2026 belum ada hasil realisasi dari pengukuran IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Begitu juga dengan capaiannya karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target yang ditetapkan. Pengukuran IK ini bersifat tahunan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini menjelaskan mengapa di Triwulan I 2025 juga tidak ada realisasi untuk IK yang sama.. Tidak ada berita resmi mengenai indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia. Hendati belum ada realisasi dan capaian, Ketua dan staf Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN selalu siap sedia untuk menyelesaikan laporan temuan BPK yang jika muncul sewaktu-waktu melalui penyampaian oleh Biro Keuangan dan/atau Inspektorat Jenderal KKP. Selain itu, Ketua dan staf Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN mencari informasi melalui laman di internet yang dapat dianggap kredibel terkait dengan meminimalisasi peluang temuan BPK.

IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. akhir Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh mitra kerja di Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan

Tabel 24. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
86%	100%	116,28%	85%	100%	117,65%	89%	nihil	112,36%

Tabel 25. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2020 s.d. 2025

2020		2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
60%	100%	65%	65%	70%	83,33%	75%	75%	100%	100%	85%	100%

Berdasarkan data dalam kedua tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada tahun Triwulan I 2026 adalah 100%, dengan target sebesar 86% maka capaiannya menjadi 116,28%. Dibandingkan dengan capaian untuk IK yang sama di tahun 2025 maka terjadi perubahan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir rencana strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 yaitu sebesar 89% maka capaian IKK menjadi 112,36%.

Realisasi indikator kinerja ini adalah berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor 1185/SJ.2/RC.610/IV/2026 tanggal 15 April 2025 kepada Kepala Biro HKLN hal 'Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2026'. Dalam Nota Dinas tersebut disampaikan terdapat 0 (nol) rekomendasi untuk Biro HKLN pada Triwulan I 2026 sehingga tidak ada rekomendasi yang harus ditindak lanjut tuntas. Hal tersebut menjadi faktor utama keberhasilan Biro HKLN mencapai besar target Indikator Kinerja ini di Triwulan I 2026. Nilai kinerja organisasi Biro HKLN yang mencapai angka di atas 100 semakin meyakinkan semua pihak bahwa secara kuantitatif realisasi Indikator Kinerja ini berpengaruh positif terhadap kinerja Biro HKLN secara keseluruhan selama Triwulan I 2026.

Faktor-faktor lain khususnya di internal Biro HKLN yang dapat dipercaya menjadi penyebab keberhasilan pemenuhan target IKU ini selama Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN senantiasa memperhatikan dan sigap menindaklanjuti apabila ada notifikasi resmi butir-butir rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Tim satker Biro HKLN yang memiliki budaya kerja cepat, cermat dan tepat mampu memberi dukungan penuh kepada setiap arahan dari jajaran pimpinan Biro HKLN serta sangat menyadari bahwa setiap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jenderal pasti berguna dalam perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;

- Ketersediaan sumber daya Biro HKLN khususnya sumber daya manusia yang menjadi penanggung jawab langsung untuk pelaksanaan IKU ini selain memadai juga efektif dan efisien yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim Kerja dan 2 (dua) orang profesional karena memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat dengan ditunjang pengalaman kerja bertahun-tahun.
- Kegiatan dalam rencana aksi yaitu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan bisa dilakukan dengan lengkap di tahun 2026.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi dan evaluasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN untuk IK ini. Tidak termonitor adanya indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang Triwulan I 2026.

IK 13 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Persentase penyerapan anggaran Biro HKLN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro HKLN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro HKLN

Tabel 26. Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN

Triwulan I 2026			Triwulan I 2025			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	≥95%	nihil	103,92%

Tabel 27. Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Akhir 2020 s.d 2025

2020		2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	98,90%	-	99,62%	95%	98,68%	95%	99,55%	95%	99,52%	95%	98,72%

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, belum dilakukan penghitungan realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN pada periode Triwulan I 2026. Demikian juga dengan targetnya tidak tersedia sehingga capaian IK ini di Triwulan I 2026 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2025 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan tepatnya di akhir tahun anggaran. Oleh karena belum ada realisasi di Triwulan I 2026 yang perlu ditampilkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target akhir tahun dalam konsep Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2026.

1. Realisasi Anggaran

Ahli pelaporan penganggaran di Biro HKLN sudah menyiapkan data penyerapan anggaran pada Januari sampai dengan Maret 2026 tersaji dalam matriks di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN BHKLN TAHUN 2026 TRIWULAN I						
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	PAGU EFEKTIF	Realisasi Anggaran			Jumlah Realisasi	% Realisasi
		Januari	Februari	Maret		
2322.PEC.051 Kerjasama Bilateral	864.776.000	4.705.100	51.266.927	30.992.074	86.964.101	10,06%
2322.PEC.052 Kerjasama Multilateral	4.253.666.000	5.906.000	443.435.482	996.565.620	1.445.907.102	33,99%
2328.BMB.051 Pemberitaan dan Opini Publik	5.921.032.000	83.484.304	95.305.086	363.315.048	542.104.438	9,16%
2328.BMB.052 Layanan Informasi Publik	793.351.000	310.960.000	75.965.200	49.402.280	436.327.480	54,98%
2328.BMB.053 Layanan Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	690.271.000	6.566.300	30.144.800	44.607.669	81.318.769	11,78%
2328.EBA.202. LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	175.870.000			27.387.936	27.387.936	15,57%
2328.962. LAYANAN UMUM	635.427.000	510.000	1.020.000	2.336.000	3.866.000	0,61%
2328.EBA.994. L. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR BHKLN	1.326.929.000	36.116.620	44.893.819	74.263.142	155.273.581	11,70%
2328.EBB. FILLER, VIDEO DOKUMENTER DAN ALAT KOMUNIKASI	3.729.600.000	-	-	-	-	0%
Jumlah	18.390.922.000	448.248.324	742.031.314	1.588.869.769	2.779.149.407	15,11%

2. Kinerja Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2026

Sejalan dengan informasi yang telah disampaikan dalam matriks di atas, realisasi anggaran Biro HKLN per 31 Maret 2026 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebesar Rp2.779.149.407,00 dari pagu efektif sebesar Rp18.390.922.000,00 atau persentasenya sebesar 15,11%.

a. Efisiensi penggunaan sumber daya di dalam Laporan Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan kinerja, sumber daya adalah seluruh input strategis yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Anggaran salah satu sumber daya yang dapat diukur capaian efisiensinya. Efisiensi anggaran merupakan upaya strategis dalam memastikan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan efisiensi anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, prioritas, serta *value for money*, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian program dan kegiatan.

Dalam implementasinya, efisiensi anggaran diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman prioritas kegiatan, serta pengendalian belanja yang lebih selektif. Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap capaian indikator kinerja utama tetap menjadi prioritas, sementara kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, atau kurang mendukung output dan outcome program dilakukan rasionalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan dan hasil yang ditargetkan.

Selain itu, efisiensi anggaran juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sinergi antarunit kerja, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Melalui penerapan efisiensi anggaran yang konsisten, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berbagai upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan, antara lain melalui pengelolaan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, penataan organisasi yang lebih ramping, penerapan pola kerja baru, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemanfaatan teknologi informasi yang andal, serta efisiensi anggaran. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mendorong penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui sinergi lintas sektor, penguatan infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta peningkatan inovasi dan kolaborasi antar-instansi.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia. Data yang digunakan dalam pengukuran efisiensi meliputi data capaian kinerja sasaran kinerja kegiatan, data pagu anggaran, dan data realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase realisasi anggaran sebagai input terhadap persentase capaian kinerja sebagai output dan outcome, yang dinyatakan dalam bentuk rasio efisiensi.

No	Sasaran Program	Anggaran (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%Realisasi Anggaran terhadap Pagu DIPA	%Realisasi Anggaran terhadap Anggaran Efektif	Nilai Pencapaian Sasaran Program (Sumber Aplikasi Kinerjaku)	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Pagu DIPA	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Anggaran Efektif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=7/9	=8/9
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP	9.420.713.000	3.728.756.001	5.691.956.999	159.139.581	1,69%	2,80%	112,48	0,00015	0,00025
2	Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama	15.000.000.000	9.881.558.000	5.118.442.000	1.532.871.203	10,22%	29,95%	112,48	0,00091	0,00266
3	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	15.579.287.000	7.998.763.000	7.580.524.000	1.087.138.623	6,98%	14,34%	112,48	0,00062	0,00128

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan dan Aplikasi Kinerjaku (diolah)

b. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Triwulan I 2026 sebagai umpan balik Perencanaan Triwulan Selanjutnya

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencapaian target IK Biro HKLN periode Triwulan I 2026 adalah pada triwulan selanjutnya, frekuensi pengukuran untuk IK Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan IK Persentase

efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan hendaknya diubah menjadi tahunan atau setidaknya semesteran. Alasan perubahan adalah responden dari kuisisioner pada kedua IK tersebut adalah orang yang sama sehingga berpotensi rentan mengalami bosan untuk mengisi kuisisioner setiap tiga bulan. Walaupun demikian, keputusan final berada di tangan Inspektorat Jenderal bersama/atau Biro Perencanaan.

Kegiatan untuk dilaksanakan pada Triwulan I 2026 termaktub dalam tabel berikut:

Tabel 32 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN PENDUKUNG
1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi dokumen kesepakatan kerja sama bilateral (rapat koordinasi, keterlibatan KKP dalam pelatihan dengan negara mitra)
2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	Pemberian layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP
3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	- Merumuskan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan - Menyampaikan posisi/rekomendasi/Prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan di forum internasional yang dihadiri Biro HKLN/KKP
4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	Pengusulan pencalonan perwakilan Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional
5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	Melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh tahapan dalam rangka pemenuhan penilaian indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada dimensi input meliputi: 1. Sumber Daya Manusia & Anggaran 2. Bahan Informasi 3. Sarana dan Prasarana 4. Media dan Saluran Komunikasi Melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh tahapan dalam rangka pemenuhan penilaian indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada dimensi proses meliputi: 1. Pengumpulan data dalam rangka perencanaan program 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Program Inovasi
6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	1. Pengelolaan konten website KKP dan Website PPID (pemutakhiran informasi publik dan publikasi konten) 2. Pengelolaan PPID dan call center sebagai kanal layanan informasi 2. Monitoring informasi berkala di website KKP dan PPID KKP 3. Forum Keterbukaan Informasi Publik (Seminar dan Penganugerahan) 4. Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik 5. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Bagi Petugas Layanan Informasi Publik/PPID 6. Implementasi arah kebijakan layanan informasi publik KKP (Kepmen KP nomor 71 tahun 2025) 7. Rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKP (monev Internal) 8. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional 9. Pendampingan dan Pembinaan PPID Pelaksana lingkup KKP dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik 10. Workshop Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) 11. Pemenuhan data dukung SAQ melibatkan eselon 2 lingkup Setjen dan tim PPID Pelaksana Eselon I 12. Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Pimpinan Badan Publik (Menteri/Wakil Menteri/Sekjen) 13. Visitasi ke PPID Pelaksana oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik 14. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Nasional

7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pameran di sektor KP dan melaksanakan pelayanan yang efektif pada lembaga mitra pada kegiatan sebagai berikut. 1. Pendampingan Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) 2. Pendampingan Kunjungan Kerja masa Reses atau Kunjungan Kerja spesifik 3. Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan 4. Unjuk rasa
8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	Pelaksanaan kegiatan pelayanan pada 9 unsur penilaian pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedu 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana (lebih diperhatikan)
9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	- Mempelajari pelaksanaan PM SAKIP di tahun sebelumnya - Menyiapkan dokumen supaya memenuhi seluruh aspek penilaian pada LKE
10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	Mengikutkan pegawai Biro HKLN pada seminar dan pelatihan yang tersedia
11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	Menindak lanjut temuan BPK
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan
13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	Menyampaikan realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala

3. Penghargaan

Kementerian Kelautan Perikanan melalui Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2026 belum memperoleh penghargaan yang bisa disampaikan dalam laporan ini.

4. Penyesuaian Anggaran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pegawai di Kelompok Kerja Dukungan Manajerial terhadap aktivitas sumber daya manusia Biro HKLN yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan-kegiatan mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2026, dinamika anggaran yang terjadi di awal tahun fiskal 2026 karena kebijakan tidak mempengaruhi secara nyata terhadap kinerja sumber daya manusia Biro HKLN dalam berkinerja melalui kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pencapaian target Indikator Kinerja. Tentu saja faktor pendukung utama keberhasilan adalah kebijaksanaan dan kepiawaian Kepala Biro HKLN dalam mengorkestrasi segenap sumber daya manusia Biro HKLN sepanjang tahun 2025.

Pagu awal BHKLN untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp40.000.000.000,00. Selanjutnya, terdapat revisi anggaran sesuai dengan arahan petinggi negara Indonesia untuk melakukan efisiensi sehingga pagu efektif BHKLN menjadi Rp18.390.922.000,00.

5. Evaluasi pencapaian kinerja

Above all, Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,... adalah inti dari evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Indikator Kinerja Biro HKLN selama Triwulan I 2026 dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, predikat yang diperoleh oleh Biro HKLN adalah 'istimewa'.
a. Mencengangkan

- b. tidak bercela Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lema 'istimewa' memiliki beberapa definisi, diantaranya yang relevan dengan laporan kinerja ini adalah:
- c. Luar biasa

Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas secara keseluruhan kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2026 tidak tak berguna dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP serta pembangunan sektor kelautan dan sektor perikanan Indonesia.

6. Perubahan budaya kinerja

Definisi dari istilah 'budaya' menurut Bapak Antropologi Indonesia yakni Prof. Koentjaraningrat (alm) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Definisi ini cukup sejalan dengan definisi dari frasa '*performance culture*' dari sebuah sumber yang dipercaya kredibel di internet yang terjemahan bebasnya ke dalam Bahasa Indonesia adalah 'budaya kinerja' yaitu '*A system that engages, develops, and inspires a diverse, high-performing workforce by creating, implementing, and maintaining effective performance management strategies, practices, and activities that support mission objectives.*' Terjemahan bebas dari definisi '*performance culture*' atau 'budaya kinerja' tersebut adalah 'Sistem yang mengikat, mengembangkan dan menginspirasi tenaga kerja yang beragam dan berkinerja tinggi melalui pembentukan, pelaksanaan dan pemeliharaan strategi, praktik dan kegiatan manajemen kinerja guna mendukung pencapaian tujuan.'

Berdasarkan definisi '*performance culture*' di atas dan berdasarkan hasil komunikasi informal dengan beberapa pegawai senior di Biro HKLN maka dapat disimpulkan bahwa Biro HKLN telah lama memiliki sistem kinerja yang cakap atau mumpuni (*excellent*). Hal ini terutama didorong oleh para pegawai yang mengerjakan tugas dan berfungsi mengelola hubungan internasional memiliki horizon berpikir atau wawasan yang tidak hanya dibatasi domestik namun mendunia dan ditularkan kepada pegawai yang mengurus kehumasan dan komunikasi. Apalagi pegawai yang menangani hubungan dengan negara-negara maju di Eropa, Asia dan Amerika Utara tidak jarang mempengaruhi para pegawai lainnya untuk bergairah dalam mencontoh sumber daya manusia dari negara maju dalam bekerja dan berkarya.

Dengan demikian dapat disimpulkan kalau pelaksanaan SAKIP di Biro HKLN selama Triwulan I 2026 tidak mengubah sistem atau '*performance culture*' yang sejak lama dihayati dan diamalkan di organisasi birokrasi dan sumber daya manusia aparatur Biro HKLN secara signifikan. Meskipun demikian, pelaksanaan SAKIP sulit dipungkiri telah memberikan warna baru dan nuansa yang lebih segar yang tentu saja mendukung produktivitas kerja dan kondusivitas serta sinergi antar sumber daya manusia aparatur baik dalam kerangka hubungan horizontal dan hubungan vertical yaitu antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

1. Realisasi IK tanggung jawab Biro HKLN di Triwulan I 2026 adalah:
 - a. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target di Triwulan I 2026 sebesar 20%, hasil penghitungannya sebesar 95,24% maka capaiannya menjadi sebesar 476,20% (pernghitungan oleh aplikasi kinerjajaku akan menjadi 120%)
 - b. Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP, target di Triwulan I 2026 adalah 89%, hasil penghitungannya sebesar 95,56% maka capaiannya menjadi sebesar 107,37%
 - c. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional. Target Indikator Kinerja di Triwulan I 2026 sebesar 10%. Hasil penghitungan realisasi sebesar 20% maka capaiannya menjadi 200 %(pernghitungan oleh aplikasi kinerjajaku akan menjadi 120%)
 - d. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan. Target Indikator Kinerja sebesar 95%. Hasil penghitungan IK sebesar 98,33% sehingga capaiannya menjadi 103,51%
 - e. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP, target Indikator Kinerjanya sebesar 91, hasil penghitungan Indikator Kinerja sebesar 97,55 maka capaiannya menjadi 105,20%.
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN, target Indikator Kinerja ini adalah 86% dan realisasinya 100% sehingga capaiannya menjadi 116,28%.
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro HKLN pada Triwulan I 2026 adalah 112,48 sehingga predikatn kinerja Biro HKLN adalah istimewa.
3. Pemenuhan target Indikator Kinerja Biro HKLN di Triwulan I 2026 diyakini telah melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP alokasi untuk Biro HKLN secara efektif dan efisien serta pendayagunaan sumber daya manusia Biro HKLN.

Saran

Pada Triwulan II 2026 dapat ditingkatkan beberapa aspek pada Indikator Kinerja berikut, yakni:

1. Aspek kecepatan pelayanan di internal Biro HKLN untuk Indikator Kinerja Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Aspek koordinasi dengan pihak eksternal pada Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zaki Mubarak**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 26 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Ditandatangani
Secara Elektronik

Zaki Mubarak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	89
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	94
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97,5
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	97,25
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	91
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87,2
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82,5
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	86
		13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	15.000.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	25.000.000.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2026		40.000.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Ditandatangani
Secara Elektronik

Zaki Mubarak